



FLYPAPER EFFECT PADA DANA ALOKASI UMUM DAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Aliferiana Irsyadhea Putri, Haryanto¹

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl. Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aimed to elucidate the effect of General Allocation Funds (DAU) and Regional Own-source Revenue (PAD) on regional expenditures (BD) and to give empirical evidence whether flypaper effects occurs in sub-districts / cities in Central Java Province from 2013 to 2017. The population and sample consisted of 29 regencies and 6 municipalities in Central Java Province with a total of 175 observation data. The data used is secondary data in the form of audited reports Actual Budget and Expenditure. This research was tested using multiple linear analysis techniques that were processed using the SPSS application (Statistical Product and Service Solution). The results showed that the PAD and DAU simultaneously and partially have a significant effecting on regional expenditures. In addition, the results of data processing also showed higher DAU Standardized Coefficients than PAD, which proved that there was a flypaper effect.

Keywords: Flypaper Effect, General Allocation Funds, Regional Own-source Revenue, and Regional Expenditure.

PENDAHULUAN

Daerah di Indonesia sekarang ini sedang melewati pertumbuhan yang cukup cepat, seiring dengan perkembangan dalam pelaksanaan otonomi daerah. Di setiap daerah memiliki wilayah otoritasnya masing-masing yang di atur oleh pemerintah daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Peran otonomi daerah antara lain untuk pemberdayaan dan pengoptimalan potensi setiap daerah. Dengan begitu tercapai tujuan dari otonomi daerah itu sendiri yaitu mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat (Liando dan Hermanto, 2017). Setiap Pemerintah Daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengelola sendiri pemerintah dan kebutuhan rakyat sesuai undang-undang, salah satunya menyusun anggaran belanja daerah (UU No. 33 Tahun 2004).

Anggaran belanja daerah merupakan rencana kebijakan keuangan yang harus mencerminkan kebutuhan konkret masyarakat dan kemampuan di setiap daerah yang disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sesuai peraturan daerah yang berlaku. Setiap daerah di Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang berbeda yang menyebabkan terjadinya kesenjangan fiskal. Hal itu memaksa Pemerintah Pusat untuk mentransfer dana yang disebut dana perimbangan. UU No. 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Anggaran belanja daerah memiliki beberapa fungsi antara lain fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi dan stabilisasi (Haryanto, 2007). Dari fungsi tersebut terdapat tantangan dan masalah dalam fungsi alokasi. Masalah tersebut adalah kurangnya ketepatan dalam pengalokasian dana di setiap daerah yang menyebabkan masih banyaknya daerah yang pelayanan publiknya kurang memadai. Pada tahun 2015, Kabupaten Semarang memiliki masalah terkait masih rendahnya alokasi anggaran di belanja modal. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan 30%, tetapi Kabupaten Semarang sendiri baru mencapai 16%. Untuk mencapai target

¹ Corresponding author

tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang terus mengoptimalkan potensi daerah agar PAD meningkat.

Dari permasalahan tersebut menandakan alokasi anggaran belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah khususnya Kabupaten Semarang belum baik dan efisien. Hal tersebut berpengaruh dalam penggunaan PAD yang belum maksimal. Di mana pemerintah daerah masih bergantung pada dana yang diberikan pemerintah pusat untuk mencukupi pengeluaran (belanja) daerah. Yang berarti terdapat kemungkinan adanya *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah.

Penelitian sebelumnya oleh Abdullah dan Halim (2003) melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah kabupaten/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Dari penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa *flypaper effect* terjadi pada DAU periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Sesuai dengan hasil tersebut *flypaper effect* merupakan kondisi ketika pemerintah daerah merespon (belanja) lebih banyak dengan menggunakan dana transfer / perimbangan khususnya DAU daripada menggunakan hasil daerahnya sendiri yaitu PAD (Mutiara Maimunah, 2006). Namun hasil penelitian tersebut tidak dapat digeneralisasikan untuk seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu dilakukan penelitian lebih mendalam untuk menganalisis *Flypaper Effect* Pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013 – 2017.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Teori Keagean

Dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara legislatif dan publik, legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal. Dalam hal pembuatan kebijakan, hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih (*voters*) dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana *voters* memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, mereka diharapkan mewakili kepentingan atau persepsi principal/pemilihnya, karena pada kenyataannya legislatif sebagai agen bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yang sama dengan publik (Abdullah dan Halim, 2006).

2. Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah yakni suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom yang diatur didalam perundang - undangan guna mengelola sendiri permasalahan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat (UU No. 33 Tahun 2004). Sedangkan mengenai hak dan kewajiban daerah ditegaskan kembali di pasal 7 bahwa daerah ber-wewenang dan berkewajiban dalam menguus rumatangganya sendiri selaras pada aturan UU yang berlaku agar tidak timbul penyimpangan dalam pelaksanaannya.

3. Desentralisasi

Menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004, desentralisasi yakni suatu pemberian tugas dan tanggung jawab otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengelola segala macam urusan serta kegiatan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan berdasarkan UNDP, badan otonom PBB (dikutip oleh Noor, 2012) definisi desentralisasi lebih merujuk pada reorganisasi wewenang sehingga ada perubahan sistem tanggung jawab antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang diharapkan bisa meningkatkan keefektifan system pemerintahan.

4. *Flypaper Effect*

Flypaper effect ialah suatu kejadian yang muncul sebab dipicu oleh permasalahan yang timbul dari efek ketergantungan aparat pemerintahan daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat (Putra dan Dwirandra, 2015). *Flypaper effect* itu sendiri ialah respon dari kenaikan dan turunnya penggunaan dana perimbangan / transfer dari pemerintah pusat.

Asumsi penentuan terjadinya *flypaper effect* pada penelitian ini mengacu pada perbandingan pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah. Melo (2002) dan Venter (2007) membuktikan bahwa *flypaper effect* terjadi jikalau pengaruh atau nilai koefisien DAU terhadap belanja daerah lebih besar daripada pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah, dan nilai keduanya signifikan. Selain itu hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh atau respon PAD terhadap Belanja Daerah tidak signifikan, maka dapat disimpulkan terjadi *flypaper effect*.

5. Pendapatan Asli Daerah

Berlandaskan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah penerimaan yang bersumber dari potensi masing – masing daerah yang berfungsi sebagai modal dasar Pemerintah Daerah dan mengurangi dependensi dana dari Pemerintah Pusat. Sumber PAD mengacu pada pemasukan setiap daerah yang dimiliki oleh dan terletak di wilayah tersebut dikumpulkan selaras dengan peraturan yang ditetapkan (Abdillah dan Mursinto, 2016). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah tersebut beserta kontribusi dari masyarakat daerah setempat yaitu berasal pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan dari pajak atau retribusi (Abdullah.,dkk, 2015). Pajak daerah merupakan kontribusi kepada daerah yang berfisat memaksa berdasarkan undang-undang. Retribusi daerah merupakan pembayaran yang berupa pungutan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan berdasarkan dari hasil perusahaan milik daerah yang nantinya dijadikan penerimaan untuk daerah. Sedangkan lain – lain pendapatan daerah yang sah berasal dari penerimaan daerah yang bukan pajak daerah (Erlina, 2015 dalam Liando, 2017).

6. Dana Alokasi Umum

Dana alokasi umum adalah dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai APBN kemudian dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pembelanjaan (UU No. 33 Tahun 2004). Dana alokasi umum seluruhnya dikelola penggunaannya oleh kepala daerah dalam pembangunan dan peningkatan pelayanan publik kepada seluruh warga di daerah itu sendiri, maka dari itu dana alokasi umum ini memiliki sifat *block grant* (Liando dan Hermanto, 2017). Daerah yang memiliki kemampuan fiskal besar namun kebutuhan fiskalnya kecil, maka alokasinya cenderung relative kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi / kemampuan fiskal yang kecil dan kebutuhan fiskal yang lebih besar, maka memperoleh alokasi dana umum yang relative besar (Rahmawati dan Suryono, 2015).

7. Belanja Daerah

Pasal 36 Ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah membagi belanja daerah menjadi dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja daerah yang penganggarnya secara langsung berkaitan dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu Belanja pegawai, Belanja barang dan jasa, dan Belanja modal. Belanja langsung ini merupakan belanja yang dianggarkan oleh pemerintah daerah setiap bulan dalam satu tahun anggaran kepada pegawai yang bersifat tetap dan untuk belanja daerah lainnya yang bersifat periodik. Sedangkan belanja tidak langsung adaah belanja daerah yang penganggarnya tidak secara langsung berkaitan dengan kegiatan dan program yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu Belanja pegawai, Belanja bunga, Belanja subsidi, Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bagi hasil, Bantuan keuangan, dan Belanja tidak terduga (Liando dan Hermanto, 2017).

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah

Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyebutkan sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Sumber Pendapatan Asli Daerah. Sumber Pendapatan Asli Daerah mengacu pada pendapatan daerah berasal dari sumber yang dimiliki oleh dan terletak di wilayah tersebut dikumpulkan sesuai dengan peraturan yang

ditetapkan. Menurut beberapa penelitian Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini digunakan suatu daerah untuk memenuhi belanja kebutuhan daerahnya. Dengan semakin banyaknya PAD maka tingkat kemandirian suatu daerah akan semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan dengan pemerintah pusat rendah. Penelitian yang telah dilakukan oleh Liando dan Hermanto (2017) dan Maimunah (2006) yang membuktikan bahwa PAD mempengaruhi Belanja Daerah. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk membiayai pengeluaran daerah terutama untuk pembangunan. Oleh karena itu semakin tinggi sumber PAD maka akan semakin besar anggaran belanja yang dikeluarkan.

H1 : PAD memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah

Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dari dana perimbangan yang diberikan pemerintah dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah dengan memperhatikan potensi daerah, keadaan geografis, luas daerah, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan (Liando dan Hermanto, 2017).

Hasil penelitian Prakoso (2004) memperoleh bukti empiris bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana Dana Alokasi Umum yang diterima dari pemerintah pusat. Penelitian berikutnya yang dilakukan oleh Harianto dan Adi (2007) semakin memperkuat bukti empiris tersebut. Mereka menemukan bahwa ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat (DAU) menjadi semakin tinggi. Sesuai penjelasan diatas, dapat disimpulkan semakin tinggi DAU maka alokasi anggaran belanja daerah juga meningkat. Hal ini disebabkan karena daerah yang memiliki pendapatan (DAU) yang besar maka alokasi untuk pengeluaran (belanja) daerah semakin tinggi.

H2 : DAU memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah

Flypaper Effect

Flypaper Effect yaitu suatu kondisi dimana pemerintah daerah lebih banyak menggunakan transfer saldo keuangan (DAU) daripada pendapatan asli daerahnya sendiri. Hal ini mengakibatkan pemborosan belanja daerah. Selain itu *flypaper effect* ini dapat menimbulkan kemalasan fiskal daerah karena pemerintah daerah lebih bergantung kepada pemerintah pusat untuk memberikan DAU daripada mengoptimalkan kemampuan daerah yang dimiliki untuk meningkatkan PAD.

Penelitian tentang analisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah (BD) di Indonesia sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Maimunah (2006) yaitu mengambil sampel pada Pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Ketika di regres pengaruh DAU terhadap BD lebih kuat daripada pengaruh PAD. Hal ini berarti terjadi *flypaper effect* dalam respon Pemda terhadap DAU dan PAD.

Penelitian lain juga dilakukan oleh Kusumadewi dan Rahman (2007) yang meneliti tentang *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan hasil pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih kuat daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t . Berdasarkan penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3: Pengaruh DAU_t terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_t terhadap BD_t

H4: Pengaruh DAU_{t-1} terhadap BD_t lebih besar daripada pengaruh PAD_{t-1} terhadap BD_t

Flypaper Effect Pada Daerah yang memiliki PAD lebih rendah dari DAU

Menurut Liando dan Hermanto (2017) daerah yang mengalami *flypaper effect* merupakan daerah yang dalam membiayai pengeluaran/belanjanya lebih banyak bersumber

dari DAU dibandingkan dengan PAD. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Abdillah dan Mursinto (2016), terjadi *flypaper effect* pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005 – 2012. Hal ini dibuktikan dengan jumlah DAU yang lebih besar komposisinya daripada PAD, yang berarti dalam memenuhi kebutuhan daerahnya pemerintah daerah lebih banyak menggunakan DAU yaitu dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dari penelitian tersebut maka penulis menarik hipotesis sebagai berikut:

H5: Daerah dengan PAD lebih rendah dari DAU mengalami flypaper effect.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

1. Pendapatan Asli Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 pasal 157 tentang Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang dijadikan modal dasar pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan dan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah tersebut. Pendapatan Asli Daerah dapat diukur dengan rumus :

PAD = Pajak Daerah + Retribusi Daerah + Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan + Lain-lain PAD yang Sah

2. Variabel Dana Alokasi Umum

Dana yang berasal dari pemerintah pusat berdasarkan APBN yang bertujuan untuk mengatasi kesenjangan perekonomian daerah dalam hal pembiayaan kebutuhan daerah disebut Dana Alokasi Umum. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dapat diukur dengan rumus :

DAU = Alokasi Dasar + Celah Fiskal

Dimana,

Alokasi Dasar = Gaji PNS daerah

Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

3. Variabel Belanja Daerah

Seluruh kewajiban daerah yang menjadi pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan disebut Belanja Daerah (UU No. 33 Tahun 2004). Belanja Daerah terdiri dari :

Belanja Daerah = Belanja Operasi + Belanja Modal + Belanja Tak Terduga + Transfer

Sedangkan untuk *flypaper effect* tidak dijabarkan definisi operasionalnya. Hal ini dikarenakan *flypaper effect* merupakan situasi yang dihasilkan oleh ketiga variabel di atas. Dimana ketika koefisien DAU lebih berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) daripada PAD maka, situasi ini disebut *flypaper effect*.

Populasi dan Sampel

Populasi yaitu keseluruhan dari objek yang diteliti dengan memiliki karakteristik tertentu. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu 35 kabupaten dan kota yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Penelitian ini dilakukan pada 5 tahun terakhir yaitu tahun 2013 – 2017, berdasarkan ketersediaan data yang diberikan pihak BPK. Sedangkan sampel adalah suatu porsi atau bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian (Mason dan Douglas, 1996). Tetapi dalam penelitian ini yang menjadi sampel yaitu keseluruhan populasi itu sendiri.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang merupakan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah yang telah diaudit pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Dari laporan tersebut dapat diperoleh data jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah pada tahun anggaran 2013 hingga tahun 2017. Untuk *Flypaper Effect* dapat diketahui setelah melihat hasil dari ketiga variabel tersebut. Sedangkan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yakni data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung tetapi melalui media perantara. Data penelitian diperoleh dari Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Provinsi Jawa Tengah.

Metode Analisis

1. Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan analisis yang terdiri dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness (Ghozali, 2016). Penyajian statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan gambaran suatu data yang dihubungkan dengan variabel dalam penelitian. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Daerah (BD).

2. Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Analisis ini bisa dilihat dengan grafik histogram dengan membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Selain itu terdapat cara yang lebih handal yaitu dengan melihat normal probability plot. Normal probability plot ini membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal tersebut akan membentuk satu garis lurus diagonal, lalu plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Apabila distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2016).

Uji Multikolinieritas

Tujuan dari uji multikolinieritas yaitu untuk mengetahui apakah model regresi memiliki korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Hasil yang baik yaitu tidak terjadi korelasi. Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF), apabila VIF tidak lebih dari 10 dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0,1, maka dapat dikatakan bebas dari multikolinieritas. Deteksi ini menggunakan SPSS dengan analisis *Collinearity Statistics* (Ghozali, 2016).

Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terdapat korelasi maka disebut ada problem autokorelasi. Autokorelasi dapat dideteksi menggunakan *Uji Durbin-Watson* (*DW test*) (Ghozali, 2016).

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah terdapat heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan Uji Glejser, yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Apabila probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5% maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

Selain itu dapat melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel independen (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Jika dalam grafik plot tersebut tidak membentuk

pola tertentu yang teratur dan titik – titik tersebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka diidentifikasi tidak terdapat heteroskedastisitas (Ghozali, 2016).

3. Uji Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian dilakukan dengan menggunakan model analisis regresi variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Model analisis regresi dirumuskan dengan persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Belanja Daerah

= *Intercept*

X₁ = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X₂ = Dana Alokasi Umum (DAU)

b₁ = Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah (PAD)

b₂ = Koefisien regresi Dana Alokasi Umum (DAU)

e = Koefisien error

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang diberikan oleh variabel independen terhadap variabel dependennya (Liando dan Hermanto, 2017). Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R² yang kecil memiliki arti yaitu kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas, dan nilai yang mendekati satu memiliki arti yaitu variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen (Ghozali, 2016).

Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui secara keseluruhan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2016). Menurut Sugiyono (dalam Rahmawati dan Suryono, 2015), kriteria pengujian uji F yaitu apabila sig. > () 0,05, maka hasil tidak baik (tidak layak) untuk dilanjutkan ke analisis berikutnya. Sebaliknya apabila sig. < () 0,05, maka hasil baik (layak) dan dapat dilanjutkan ke analisis berikutnya.

Uji Statistik t (Uji t)

Pada dasarnya uji statistik t ini digunakan untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh masing – masing variabel independen dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2016). Dalam penelitian ini, uji t dilakukan untuk menganalisis H₁ hingga H₄ secara parsial.

Salah satu cara melakukan uji ini yaitu dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabel. Jika nilai t hitung > nilai t tabel, maka hasil t hitung tersebut signifikan yang berarti hipotesis alternatif diterima. Hasil tersebut juga menandakan bahwa variabel independen secara individual mempengaruhi variabel dependen (Ghozali, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini, mendeskripsikan *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah. Obyek penelitian ini adalah 35 Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 29 Pemerintah Kabupaten dan 6 Pemerintah Kota. Sampel yang diambil melalui metode sensus adalah keseluruhan dari populasi itu sendiri. Akan tetapi total sampel tersebut harus dikurangi sebanyak 5 data yang telah diuji secara statistik sebagai data outliers sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 170 sampel.

Dana Alokasi Umum

Tabel 4.2
Dana Alokasi Umum
Tahun 2013 – 2017
(Dalam Rupiah)

DANA ALOKASI UMUM					
TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
RATA -	795.686.	861.503.	888.409.	971.227.	956.806.
RATA	670.629	873.686	658.943	604.260	944.997

Berdasar Tabel 4.2 diketahui jumlah rata – rata Dana Alokasi Umum (DAU) selama tahun 2013 – 2017 cenderung mengalami peningkatan setiap tahun, meskipun di tahun 2017 terjadi penurunan tetapi tidak terlalu signifikan. Dengan meningkatnya Dana Alokasi Umum (DAU) di Provinsi Jawa Tengah ini mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Diharapkan tujuan dari pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut yaitu untuk menyamaratakan kemampuan keuangan setiap daerah dapat tercapai di Provinsi Jawa Tengah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tabel 4.3
Pendapatan Asli Daerah
Tahun 2013 – 2017
(Dalam Rupiah)

PENDAPATAN ASLI DAERAH					
TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
RATA-	174.048	252.811.	280.634.	320.192.	411.362.
RATA	.466.331	296.520	120.144	511.227	452.727

Berdasar tabel 4.3 dapat diketahui rata – rata selama tahun 2013 - 2017 Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dapat diartikan bahwa kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki potensi daerah yang bertambah setiap tahunnya. Dengan demikian Provinsi Jawa Tengah memiliki kemandirian otonomi daerah dalam membiayai pembangunan daerah sehingga tidak tergantung dengan Pemerintah Pusat untuk membiayai belanja daerahnya.

Belanja Daerah (BD)

Tabel 4.4
Belanja Daerah
Tahun 2013 – 2017
(Dalam Rupiah)

BELANJA DAERAH					
TAHUN	2013	2014	2015	2016	2017
RATA -	1.319.991.	1.531.074.	1.740.132	2.037.584.	2.123.256.
RATA	047.882	523.396	.846.752	992.980	316.489

Pada tabel 4.4 tersebut selama tahun 2013 hingga 2017 jumlah belanja daerah selalu mengalami peningkatan. Dengan demikian hasil ini menandakan bahwa pemerintah daerah berusaha selalu memenuhi kebutuhan daerahnya. Salah satunya dengan melakukan pengembangan infrastruktur yang ditujukan untuk pelayanan publik (Rahmawati dan Suryono, 2015).

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.5
Uji Statistik Deskriptif
(dalam rupiah)

	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
PAD	170	95.192.786.972	648.091.381.096	257.748.944.658	104.407.206.773
DAU	170	358.331.867.000	1.398.539.653.000	887.585.271.005	240.278.077.808
BD	170	529.237.634.485	3.200.686.516.259	1.702.522.717.235	542.458.268.617
Valid N (listwise)	170				

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat dilihat bahwa dari 170 data yang diteliti, jumlah yang terendah dari variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimiliki oleh Kabupaten Blora pada tahun 2013 sebesar Rp 95.192.786.972. Sementara jumlah tertinggi PAD dimiliki oleh Kabupaten Cilacap tahun 2017 sebesar Rp. 648.091.381.096.

Untuk variabel Dana Alokasi Umum (DAU), terlihat bahwa dari 170 data jumlah yang terendah dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2013 sebesar Rp. 358.331.867.000. Sementara jumlah tertinggi DAU dimiliki oleh Kabupaten Banyumas tahun 2016 sebesar Rp. 1.398.539.653.000.

Belanja Daerah (BD) jumlah yang terendah dimiliki oleh Kota Salatiga pada tahun 2013 sebesar Rp. 529.237.634.485. Sementara jumlah tertinggi BD dimiliki oleh Kabupaten Banyumas tahun 2017 sebesar Rp. 3.200.686.516.259.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4.6
Uji Normalitas

Statistik Uji	Nilai
Kolmogorov-Smirnov Z	0,699
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,714

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Berdasarkan hasil pengujian data pada tabel 4.6 dapat dilihat besarnya nilai *Kolmogorov-Smirnov* adalah 0,714 dengan probabilitas signifikansi 0,699. Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi $> = 0,05$ maka kriteria pengujian yang pertama diterima yang berarti data residual terdistribusi secara normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 4.7
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model		Collinearity Statistiks	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.680	1.471
	DAU	.680	1.471

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Berdasarkan hasil output SPSS pada tabel 4.6 bagian coefficient diperoleh nilai Variance Inflation Factor (VIF) variabel PAD sebesar 1,471 dan DAU sebesar 1,471. Nilai ini menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Lalu untuk nilai tolerance tabel 4.6 variabel PAD yaitu 0,680 begitu pula dengan variabel DAU yang bernilai 0,680. Hasil tersebut melebihi 0,10 bahkan mendekati 1. Dengan demikian tidak terdapat gejala multikolinearitas atau tidak berkorelasi antar variabel independen yaitu PAD dan DAU.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.8
Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	1.783 ^a

a. Predictors: (Constant), PAD, DAU

b. Dependent Variable: Belanja daerah

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Berdasarkan hasil pengujian, dapat dilihat bahwa nilai statistik Durbin Watson (DW) pada tabel 4.8 sebesar 1.783. Nilai tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikansi 5%, jumlah observasi (N) sebanyak 170, dan jumlah variabel independen (k) sebanyak 2. Maka berdasarkan tabel DW didapatkan nilai d sebesar 1,7730 dan nilai dL 1,7254 Dengan demikian diperoleh $d < d < 4-d$, yaitu $1,7730 < 1,783 < 2,227$.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.9
Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
PAD	0.170	Tidak terjadi Heteroskedastisitas
DAU	0.981	Tidak terjadi Heteroskedastisitas

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.05, maka dapat dikatakan bahwa tidak terjadi Heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tujuan digunakan persamaan regresi linier berganda untuk menganalisis seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melakukan pendugaan terhadap variabel dependen yaitu Belanja Daerah, apabila terjadi perubahan pada variabel independen (PAD dan DAU) yang mempengaruhi Belanja Daerah.

Menurut tabel di bawah ini, maka terbentuklah persamaan regresi dibawah ini :

$$Y = 26,866 + 7,576PAD + 1,178DAU + e$$

Tabel 4.10
Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a				t	Sig.
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
	B	Std. Error	Beta			
(Constan)	26.866	.035			774.619	.000
1 PAD	7.576	.000	.224		7.246	.000
DAU	1.178	.000	.800		25.924	.000

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Dengan persamaan regresi linier berganda tersebut, maka dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

- a. Nilai Konstanta (a) = 26,866
Nilai konstanta (a) sebesar 26,866 menunjukkan bahwa apabila PAD dan DAU dalam kondisi tetap atau konstan, maka belanja daerah akan sebesar 26,866 pula.
- b. Nilai $\beta_1 = 7,576$
Nilai β_1 bernilai 7,576 yang memiliki tanda koefisien positif, hal ini menunjukkan adanya perubahan yang searah antara PAD dengan belanja daerah. Berarti apabila terdapat peningkatan pada PAD sebesar 1 Rupiah, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 7,576 Rupiah dengan asumsi variabel PAD konstan.
- c. Nilai $\beta_2 = 1,178$
Nilai β_2 menunjukkan nilai 1,178 yang memiliki tanda koefisien positif, hal ini menunjukkan adanya perubahan yang searah antara DAU dengan belanja daerah. Berarti apabila terdapat peningkatan pada DAU sebesar 1 Rupiah, maka belanja daerah akan mengalami peningkatan sebesar 1,178 Rupiah dengan asumsi variabel PAD konstan.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 4.11
Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.944 ^a	.892	.891	.11700

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Dapat diketahui dari tabel tersebut bahwa nilai koefisien determinasi (R²) adalah 0,939 atau 89,2% yang artinya variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel PAD dan DAU sebesar 89,2%. Sisanya yaitu 10,8% dijelaskan oleh variabel atau factor lain diluar model regresi ini.

Hasil Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)

Tabel 4.12
Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	18.873	2	9.436	689.337	.000 ^b
	Residual	2.286	167	.014		
	Total	21.159	169			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), PAD, DAU

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

Pada table ANOVA diatas menghasilkan uji F sebesar 689.337 dengan tingkat signifikansi 0,000. Oleh karena sig sebesar $0,000 < 0,05$, maka H1 yang menyatakan DAU dan PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah terdukung. Jadi dapat disimpulkan bahwa kebijakan belanja daerah dipengaruhi oleh besarnya Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah.

Hasil Uji Statistik T (Uji t)

Tabel 4.13
Uji Statistik T

Variabel	T	Sign	Alpha (α)	Keterangan
PAD	7.246	.000	0,05	Berpengaruh signifikan
DAU	25.924	.000	0,05	Berpengaruh signifikan

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

a. Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan hasil dari tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel PAD mempunyai nilai t_{hitung} 7,246 sehingga lebih besar dari t_{tabel} 1,97419 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa H1 yaitu PAD berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah diterima.

b. Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel PAD mempunyai nilai t_{hitung} 25,924 sehingga lebih besar dari t_{tabel} 1,97419 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dapat diketahui bahwa H2 yaitu DAU berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah diterima.

Dari hasil pengujian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 hingga 2017 terdapat *flypaper effect* (H3 diterima), karena Hasil tabel 4.13 menunjukkan t_{hitung} DAU $>$ t_{hitung} PAD.

Berikut adalah uji statistik T berdasarkan PAD dan DAU periode tahun sebelumnya yaitu tahun 2016 dan Belanja Daerah tahun terakhir penelitian yaitu 2017 (keterangan lebih lanjut terdapat dalam lampiran) :

Tabel 4.14
Uji Statistik T

Variabel	T	Sign	Alpha (α)	Keterangan
PAD	12.438	.000	0,05	Berpengaruh signifikan
DAU	18.188	.000	0,05	Berpengaruh signifikan

Sumber : data olahan SPSS 23, 2018

a. Pengujian Pendapatan Asli Daerah (PAD_{t-1}) terhadap Belanja Daerah (BD_t)

Berdasarkan hasil dari tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel PAD mempunyai nilai t_{hitung} 12,438 sehingga lebih besar dari t_{tabel} 1,99601 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa PAD_{t-1} secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap BD_t .

b. Pengujian Dana Alokasi Umum (DAU_{t-1}) terhadap Belanja Daerah (BD_t).

Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa variabel DAU mempunyai nilai t_{hitung} 18,188 sehingga lebih besar dari t_{tabel} 1,99601 dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dapat disimpulkan bahwa DAU_{t-1} secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap BD_t .

Dari hasil pengujian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa dari pengaruh PAD_{t-1} dan DAU_{t-1} terhadap BD_t terdapat *flypaper effect* (H4 terdukung), karena hasil tabel 4.14 menunjukkan t_{hitung} $DAU_{t-1} >$ t_{hitung} PAD_{t-1} .

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “*Flypaper effect* Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2017” maka kesimpulannya :

1. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja daerah. . Namun jika dibandingkan dengan DAU, hasil PAD lebih rendah. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanjanya bergantung pada jumlah DAU dibandingkan PAD.
2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tahun sebelumnya dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun sebelumnya berpengaruh positif serta signifikan terhadap belanja daerah tahun berjalan. . Namun jika dibandingkan dengan DAUt-1, hasil PADt-1 lebih rendah. Hal ini berarti pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan belanja tahun berjalan lebih ditentukan pada jumlah DAU tahun sebelumnya dibandingkan PAD tahun sebelumnya.
3. Menurut hasil pengolahan data, menunjukkan bahwa nilai *Standardized Coefficients* Dana Alokasi Umum lebih tinggi dari nilai *Standardized Coefficients* Pendapatan Asli Daerah, yaitu sebesar 0,465 untuk DAU dan 0,638 untuk PAD. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi *flypaper effect*. Untuk memperkuat analisis ini terdapat hasil kontribusi yang juga menunjukkan jumlah DAU > PAD.

REFERENSI

- Abdillah, K. dan D, Mursinto. 2016. The Effects of Financial Balance Transfer and Regional Own-Source Revenue on Regional Expenditure of Regencies and Municipalities in East Java Province. *Journal of Scientific and Research Publikations*, Vol. 6, No. 5, h. 26-30.
- Abdullah, S. dan A. Halim. 2003. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali.), *Simposium Nasional Akuntansi VI*. Surabaya. 16-17 Oktober 2003.
- Abdullah, S. dan A. Halim. 2006. Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemerintahan dan Sumber Pendapatan. *Jurnal Akuntansi Pemerintah*, Vol. 2, No. 2.
- Abdullah., Dwi Asmawanti, dan Febriansyah. 2015. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sumatera Bagian Selatan. *Jurnal Ilmiah*, Vol.41, No.3.
- Bahrul, U. R. 2010. “Analisis Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Dan Deteksi Ilusi Fiskal (Studi Kasus Provinsi di Indonesia Tahun 2005- 2008)”. *Skripsi*, Universitas Diponegoro.
- Darwanto dan Y. Yustikasari. 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal: Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali, *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar. 26-28 Juli 2007.
- Ekawarna, S. U. 2017. Analisis *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, Vol. 4, No. 3, h. 2338–4603.
- Erlina., O. S. Rambe dan Rasdianto. 2015. Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 dan Permendagri No. 64 Tahun 2013. Salemba Empat, Jakarta.
- Ghozali, I. 2016 . Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23. Edisi VIII. Badan Penerbit – UNDIP, Semarang.



- Halim, A. 2009. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi Pertama. Salemba Empat, Jakarta.
- Harahap, S. S. 2004. Analisis Kritis atas Laporan Keuangan. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hariato, D dan P. H. Adi. 2007. Hubungan Antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan per Kapital. *Simposium Nasional Akuntansi X*. Makassar. 26-28 Juli 2007, pp. 1-26.
- Haryanto. 2007. Akuntansi Sektor Publik. Edisi I. Badan Penerbit – UNDIP, Semarang.
- Hendriksen, E.S dan M. F. V. Breda. 2001. *Accounting Theory*, Edisi 5. Mc Graw-Hill, New York.
- Kusumadewi, A. D. dan A. Rahman. 2007. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota Di Indonesia. *JAAI*, Vol. 11, No. 1, h. 67 - 80.
- Liana, L. 2009. Penggunaan MRA dengan SPSS Untuk Menguji Pengaruh Variabel Moderating Terhadap Hubungan Antara Variabel Independen dan Variabel Dependen. *Jurnal Teknologi Informasi DINAMIK*. Semarang. Juli 2009. Vol. 14, No. 2, h. 90-97.
- Liando, I. I dan S.B. Hermanto. 2017. Faktor -Faktor yang Mempengaruhi Belanja Daerah pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. 22, h. 1 – 22.
- Maimunah, M. 2006. *Flypaper Effect* pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera, *Simposium Nasional Akuntansi IX*. Padang, 23-26 Agustus 2006.
- Mardiasmo. 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Andi, Yogyakarta.
- Mason, R. D dan D. A. Lind. 1996. Teknik Statistik Untuk Bisnis dan Ekonomi. Penerbit Erlangga, Jakarta
- Melo, L. (2002). The Flypaper Effect under Different Institutional Contexts: The Colombian Case. *Publik Choice*, 2002, Vol.111, h. 317-345.
- Muhtarom, A. 2015. Analisis PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2010-2015. *Jurnal EKBIS*, Vol. 2, No. 1, h. 229-243.
- Murniasih, E. dan M. S. Mulyadi . 2011. Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Perilaku Fiskal Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, Vol. 12, No. 1, h. 56 - 71.
- Noor, M. 2012. *Memahami Desentralisasi Indonesia*. Interpena, Yogyakarta.
- Oktora, F. E. dan W. Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus atas Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *Journal Accountability*, Vol. 2, No. 1, h. 1-10.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia. 2004. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Sekretariat



Negara. Jakarta.

Pemerintah Daerah. 2006. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sekretariat Negara, Jakarta.

Prakosa, K. B. 2004. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik Di Wilayah Propinsi Jawa Tengah dan DIY). *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, Vol. 8, No. 2, h. 101 - 118.

Putra, I. B. D dan A. A. N. B. Dwirandra. 2015. Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol. 13, No. 3, h. 811 – 827.

Rahmawati, L. A dan B. Suryono. 2015. *Flypaper Effect* Dana Alokasi Umum dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 4, No. 9, h. 1 – 20.

Sari, R. P. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY).

Sari, R. P. dan I. G. B. Indrajaya. 2014. Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Badung. *E-Jurnal EP Unud*, Vol. 3, No. 10, h. 452 - 459.

Solikin, I. dan Widiawaty. 2010. Hubungan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) dengan Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi UPI*, Vol. 1, No. 2, h. 165 – 177.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Alfabeta, Bandung.

Suliyanto. 2011. Ekonometrika Terapan: Teori Dan Aplikasi Dengan SPSS Edisi 1. ANDI, Yogyakarta.

Tasrin, K dan P. Wulandari. 2012. Kajian Pengaruh Kebijakan Desentralisasi pada Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat). *J. Borneo Administrator*. Vol. 8, No. 2, h. 230-253.

United Nations Development Program (UNDP). 1997. Governance for sustainable human development.

Venter, D. 2007. Multiparty Democracy And Politics In Africa. *EASSRR*, Vol. 19, No. 1.

Wagner, A. 1883. “Three Extracts on Publik Finance”, translated and reprinted in R.A. Musgrave and A.T. Peacock (eds). Macmillan, London.